

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

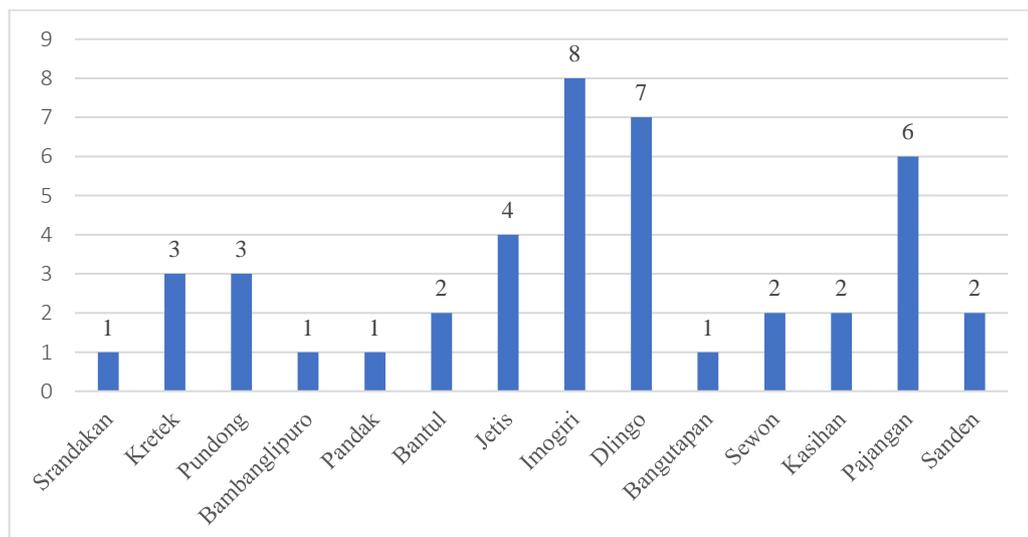
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan banyaknya potensi wisata di Indonesia selain itu adanya potensi bencana yang menimpa tempat wisata. Faktor eksternal yang dapat menghambat pertumbuhan pariwisata salah satunya adalah risiko bencana (Fadafan et al., 2018). Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani dan mencegah krisis dan bencana, industri pariwisata masih rentan terhadap bencana. Keamanan yang juga mempertimbangkan keselamatan pengunjung apabila terjadi bencana merupakan salah satu syarat dasar kesesuaian suatu destinasi wisata (Ariyani et al., 2023). Arti penting keselamatan dan keamanan bagi wisatawan merupakan upaya untuk menjamin kenyamanan dan keamanan selama melakukan perjalanan menuju dan dari destinasi wisata untuk mengurangi risiko yang ada. Adanya perencanaan dan pengelolaan kawasan pariwisata yang mempertimbangkan aspek kebencanaan perlu dilakukan (Ariyanto, 2018).

Salah satu prioritas utama dalam pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah penciptaan destinasi wisata yang aman dari bencana sebagai upaya untuk mengurangi situasi darurat. Karena sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat rentan terhadap krisis dan bencana. Krisis pariwisata yang terjadi disebabkan oleh faktor alam dan faktor non alam (Hendriyani, 2023). Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengukung program wisata aman bencana di destinasi pariwisata Indonesia. Program ini tidak

hanya fokus ke destinasi wisata favorit namun dikembangkan sampai ke tingkat desa wisata (Rahman et al., 2022).

Kabupaten yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kabupaten Bantul terkenal dengan destinasi wisatanya. Kabupaten Bantul menawarkan beragam destinasi wisata potensial, seperti industri kerajinan, taman hiburan, situs budaya dan sejarah, serta wisata alam. Kabupaten Bantul berpotensi berkembang menjadi daerah tujuan wisata populer berkat potensi wisata tersebut. Mayoritas wisata di Kabupaten Bantul adalah desa wisatanya (Churniawan, 2018). Menurut (Hadiwijoyo, 2012) desa wisata adalah kawasan pedesaan yang mempunyai keseluruhan suasana yang unik dan khas dari segi sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, dan kehidupan sehari-hari, serta arsitektur bangunan yang unik, kegiatan ekonomi yang menarik, dan potensi pengembangan fasilitas bagi wisatawan seperti atraksi, penginapan, makanan, dan keperluan lainnya.

Gambar 1.1 Desa Wisata di Kabupaten Bantul



Sumber: Diolah oleh Penulis (2023)

Grafik diatas merupakan bagan desa wisata yang berada di Kabupaten Bantul diklasifikasikan berdasarkan kecamatan dengan total keseluruhan 43 desa wisata. Berdasarkan Kawasan Rawan Bencana Menurut Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul tahun 2010-2030 seluruh kawasan Kabupaten Bantul merupakan kawasan rawan gempa bumi yang berarti juga seluruh desa wisata berisiko gempa bumi. Sebanyak 24 desa wisata berada pada daerah rawan tanah longsor berada di Kecamatan Dlingo, Imogiri, Pundong dan Pajangan. 12 desa wisata masuk dalam kawasan rawan banjir berada di Kecamatan Srandakan, Pandak, Kretek, Pundong dan Jetis.

Tabel 1.1 Kejadian Bencana Kabupaten Bantul Tahun 2019-2022

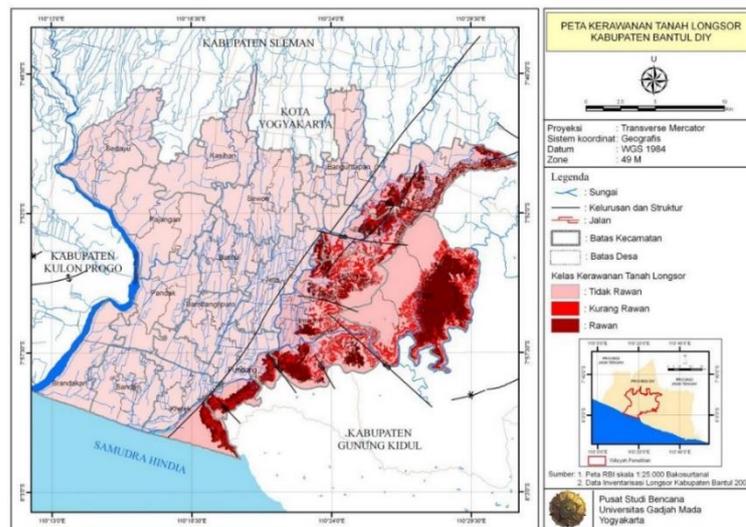
Bencana	Tahun			
	2022	2021	2020	2019
Tanah Longsor	176	103	99	220
Gempa	9	12	14	15
Kebakaran	134	92	127	225
Angin	13	33	44	54
Banjir	5	4	2	6

Sumber: BPBD DIY (2023)

Tabel Kejadian Bencana Kabupaten Bantul Tahun 2019-2022 diketahui bahwa Kabupaten Bantul mengalami bencana tanah longsor, gempa, kebakaran, angin, dan banjir. Bencana gempa bumi mengancam seluruh kawasan Kabupaten Bantul karena adanya patahan atau Sesar Opak. Sesar Opak atau patahan Opak merupakan salah satu jenis struktur geologi yang terbentuk di dataran Bantul-Klaten. Sesar opak termasuk dalam zona patahan aktif. Pergeseran Sesar Opak menyebabkan terjadinya gempa bumi yang terjadi pada tahun 2006 (Pambudi, 2021). Selain itu, bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Bantul adalah

tanah longsor. Kawasan rawan longsor di Bantul antara lain di wilayah Imogiri, Dlingo, Piyungan, dan Pleret, membuat Kabupaten Bantul menjadi salah satu wilayah yang sering mengalami bencana alam (Maulana et al., 2023).

Gambar 1.2 Peta Daerah Rawan Longsor Kabupaten Bantul



Sumber: Pusat Studi Bencana UGM (2014)

Didukung oleh penelitian (Damayanti et al., 2016) yang mengidentifikasi kawasan rawan longsor di Kecamatan Dlingo dan Kecamatan Imogiri Bantul. Metode identifikasi yang digunakan adalah *Fuzzy* AHP Hasil yang didapatkan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Kalsifikasi Daerah Rawan Longsor Kecamatan Dlingo dan Imogiri

Klasifikasi Kerawanan	Luas Area (Ha)	Persentase (%)
Rendah	2221,854	19,93
Sedang	6944,036	62,30
Tinggi	2080,714	17,77

Sumber : (Damayanti et al., 2016)

Pada Kecamatan Imogiri tingkat kerawanan tanah longsor yang paling tinggi yaitu di Desa Selopamiro dengan luas 638,597 Ha, lalu diikuti Desa

Wukirsari seluas 524,320. Sedangkan tingkat kerawanan tanah longsor yang paling tinggi di Kecamatan Dlingo ada di Desa Muntuk dengan luas 126,812 Ha, lalu diikuti Desa Mangunan dengan luas 123,963 Ha.

Ide pariwisata berbasis komunitas lahir dari keterbatasan pemerintah untuk menerapkan pengembangan pariwisata yang fokus pada nilai-nilai menjaga lingkungan dan budaya lokal sekaligus menawarkan manfaat jangka panjang. Ditambah dengan adanya risiko bencana yang menimpa tempat wisata, maka diperlukan pengembangan pariwisata aman bencana. Apabila dihubungkan dengan adanya desa wisata yang termasuk dalam kawasan rawan bencana maka hal ini dapat menjadi perhatian bagi segala kalangan yang terlibat salah satunya adalah masyarakat atau komunitas. (Jamalina & Wardani, 2017). Untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan, pariwisata berbasis masyarakat menggunakan partisipasi masyarakat sebagai komponen utamanya atau bisa disebut *Community Based Tourism* (CBT). Desa wisata sebagai bentuk penerapan CBT menjadi pilihan wisata di Indonesia. Kearifan lokal dan tradisi budaya masyarakat menjadi penggerak utama kegiatan desa wisata. Selain itu, komunitas lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan suatu objek wisata menjadi bagian dari sistem ekologi yang saling terkait. (D. Wahyuni, 2018).

Desa wisata yang ada di Kabupaten Bantul yang berada di kawasan rawan bencana yaitu Desa Wisata Kaki Langit dan Desa Wisata Wukirsari. Desa Wisata Kaki Langit terletak di Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo. Desa Wisata Kaki Langit berada di ketinggian 320 MDPL, dengan keadaan topografi perbukitan batuan kapur. Seluruh aktivitas yang ada di Desa Wisata Kali Langit dirancang

untuk menumbuhkan rasa keberdayaan masyarakat di dalamnya. Ini mengeksplorasi potensi sumber daya manusia, alam, dan budaya tradisional. Di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul terdapat Desa Wisata Wukirsari. Batik tulis yang merupakan kerajinan turun temurun di Desa Wukirsari. Pusat batik setempat sering berkonsultasi dengan berbagai perguruan tinggi dan sekolah untuk belajar tentang batik. Selain itu, wisatawan juga dapat membeli batik tulis dengan harga terjangkau. Desa Wukirsari telah meraih banyak penghargaan. Selain kerajinan asli yang menjadi daya tarik utama, kondisi geografis Desa Wukirsari yang beragam, mulai dari perbukitan, sungai, hutan, hingga lahan pertanian, menjadikan kawasan ini memiliki pemandangan yang menawan.

Sudah banyak penelitian terdahulu tentang penanggulangan bencana di kawasan wisata baik itu berbasis pemerintah, masyarakat/komunitas, dan kolaborasi. Namun belum banyak penelitian yang menerapkan pariwisata aman bencana berbasis masyarakat/komunitas yang menggunakan konsep *Community Based Tourism*. Berdasarkan penjabaran latar belakang, peneliti tertarik untuk meneliti penerapan pariwisata yang aman dari risiko bencana supaya pengunjung atau wisatawan mendapatkan rasa aman dan keselamatan saat mengunjungi kawasan Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari. Partisipasi dari masyarakat atau komunitas dalam menciptakan pariwisata aman bencana juga penting dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul: ***Community Based Tourism: Pengembangan Pariwisata Aman Bencana Berbasis Komunitas Lokal di Kabupaten Bantul.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menunjukkan adanya potensi wisata di Kabupaten Bantul berupa desa wisata yang berbasis masyarakat/komunitas disebut juga *Community Based Tourism* (CBT). Namun, di sisi lain adanya risiko bencana di kawasan desa wisata yang berada di Kabupaten Bantul. Seluruh desa wisata yang ada di Kabupaten Bantul berjumlah 43 berada di daerah rawan gempa bumi, 24 desa wisata berada di daerah rawan tanah longsor, dan 12 desa wisata berada di daerah rawan banjir. Dengan adanya desa wisata di daerah rawan bencana maka pengembangan pariwisata aman bencana berbasis komunitas lokal diperlukan. Rumusan masalah yang diambil yaitu:

Bagaimana Pengembangan Pariwisata Aman Bencana Berbasis Komunitas Lokal Melalui *Community Based Tourism* di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Pengembangan Pariwisata Aman Bencana Berbasis Komunitas Lokal Melalui *Community Based Tourism* di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian yang akan dilakukan mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi serta manfaat langsung ataupun tidak langsung khususnya bagi Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, dan mahasiswa lain pada umumnya. Serta dapat

menjadi referensi dan dijadikan sebagai kajian bagi peneliti lain yang tertarik dengan penerapan wisata aman bencana desa wisata yang menggunakan konsep *Community Based Tourism* (CBT).

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian dan hasil penelitian ini dapat memberikan referensi, informasi, dan evaluasi kepada masyarakat serta pemerintah Desa Mangunan dan Wukirsari serta terkait dalam pengembangan pariwisata aman bencana dan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pembaca terkait dengan pariwisata daerah khususnya desa wisata dan pemerintah setempat untuk mengembangkan desa wisata ke arah berkelanjutan.

E. Kajian Pustaka

Proses penelitian yang berjudul Implementasi Wisata Aman Bencana Melalui Komunitas Lokal di Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari membutuhkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian sebagai batasan atau fokus dalam melakukan penelitian. Dengan adanya studi terdahulu sebagai bukti keorisinalan penelitian bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan. Pada studi terdahulu dikategorikan berdasarkan tema yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini menggunakan 33 artikel jurnal tentang Pariwisata Aman Bencana dari tahun 2017-2023. Penelitian ini juga dibantu menggunakan *software VOSviewers* untuk menyajikan data secara visual.

Pandangan mengenai pentingnya manajemen risiko bencana adalah menciptakan rasa aman di kawasan wisata. Pentingnya kemandirian dan keselamatan bagi sebuah wisata dijelaskan oleh (Arianto et al., 2022) bahwa arti penting keselamatan dan keamanan bagi wisatawan merupakan upaya untuk menjamin

kenyamanan dan keamanan selama melakukan perjalanan menuju dan dari destinasi wisata, baik sendiri maupun bersama keluarga, guna mengurangi risiko yang ada di lokasi. Wisatawan mengutamakan keselamatan dan keamanan dalam memilih destinasi, sehingga sebagai wilayah yang secara geografis rawan bencana, khususnya wilayah wisata. Adanya perencanaan dan pengelolaan kawasan pariwisata yang mempertimbangkan aspek kebencanaan perlu dilakukan. Dalam (Ni` maturrohmah et al., 2022) mengemukakan bahwa pengembangan pariwisata harus sejalan dengan keamanan objek wisata tersebut dari risiko kebencanaan. Tingkat keamanan yang tinggi dapat dilihat dari keamanan objek wisata dari bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, dan bencana alam lainnya. Perlunya mengetahui risiko bencana yang ada di suatu kawasan dibahas oleh (Budiatiningsih & Rosyidie, 2022) suatu daerah dikatakan rawan bencana apabila mempunyai ciri-ciri yang membuatnya kurang mampu menahan dampak bencana. Tingginya risiko bencana bagi pengunjung di kawasan wisata rawan bencana disebabkan oleh beragamnya karakteristik wisata yang ada, terutama ketika terjadi bencana dan terutama jika pengunjung kurang memiliki kesadaran akan bencana. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya untuk memastikan masyarakat yang berisiko (*people at risk*) memiliki kesiapan dan ketangguhan dalam menghadapi ancaman bencana alam. *People at risk* terdiri atas masyarakat yang bertempat tinggal maupun beraktivitas di kawasan rawan bencana, termasuk pengunjung wisata.

Bencana juga akan mempengaruhi banyak pihak disekitar wisata, dijelaskan oleh (Hijrawadi et al., 2022) bahwa destinasi wisata tidak terhindarkan dari bencana

alam. Saat dilanda bencana alam saat itu juga organisasi kepariwisataan mengalami krisis, diantaranya objek wisata itu sendiri, restoran, hotel dan organisasi terkait lainnya. Dalam (Shalih et al., 2019) dengan adanya risiko maka perlunya memiliki tingkat ketahanan akan bencana dengan mempertimbangkan ancaman dan risiko bencana perlu adanya upaya-upaya pengurangan risiko dikawasan wisata. Hal ini yang menjadi perhatian dalam industri pariwisata sesuai dalam penelitian (Ariyani et al., 2023) kriteria standar kelayakan destinasi wisata salah satunya adalah keamanan yang menyangkut wisatawan saat terjadi bencana. Kenyamanan dan keamanan merupakan aspek yang sangat penting dalam keberlangsungan pariwisata yang menjadi suatu tantangan dalam industri pariwisata. Adanya risiko bencana di tempat-tempat wisata maka diperlukan pengurangan risiko bencana seperti dalam penelitian (Aldriani & Andra, 2020) memaparkan bahwa kegiatan wisata memerlukan program masyarakat tangguh bencana yang menyesuaikan risiko bencana yang ada di tempat wisata. Masyarakat dibantu pemerintah dalam pengelolaan tempat wisata masih kurang memperhatikan keamanan dan pemahaman edukasi kepada wisata tentang adanya potensi bencana yang berisiko. Tempat wisata harus memiliki satandarisasi kelayakan supaya aman dan nyaman bagi pengunjung wisata.

BNPB selaku lembaga penanggulangan bencana Indonesia melakukan upaya agar terciptanya wisata yang aman bencana seperti dalam (Kurniasari, 2017) Tahapan yang dilakukan Indonesia dalam menangani krisis di sektor pariwisata diantaranya adalah rehabilitasi, rekonstruksi, *recovery* hingga *build back better*. BNPB selaku lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk merumuskan kebijakan

hingga evaluasi kebijakan mengenai penanggulangan bencana. (Rahman et al., 2022) maka dari itu Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengususung program wisata aman bencana di destinasi pariwisata Indonesia. Program ini tidak hanya fokus ke destinasi wisata favorit namun dikembangkan sampai ke tingkat desa wisata. Selain itu penelitian (Pucangan & Arimbawa, 2020) mengatakan salah satu strategi yang akan digunakan untuk mewujudkan ini adalah melalui pengembangan desa-desa dan kelurahan-kelurahan yang tangguh terhadap bencana melalui program yang dicetus oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk operasi tanggap darurat, evakuasi dan pemulihan pasca keadaan darurat.

Tidak hanya dalam lingkup nasional, penanggulangan bencana lingkup regional juga perlu dilakukan penelitian (E. S. Wahyuni et al., 2020) menyebutkan peran serta dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan kegiatan seperti pembuatan baliho dan rambu bencana, peta jalur evakuasi, dan shelter yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata berbasis mitigasi bencana. Selain memberikan dampak positif untuk organisasi, kegiatan ini juga membantu pemerintah daerah dalam mempromosikan pariwisata tahan bencana. Adanya kegiatan-kegiatan ini juga memberikan manfaat bagi penduduk lokal dan pengunjung, yang dapat bermanfaat bagi kedua kelompok jika terjadi bencana. Penanganan bencana tidak cukup dilakukan oleh satu pihak saja (Yumantoko, 2017) peran pihak-pihak ketika bencana terjadi seharusnya bisa meminimalisir adanya

efek akibat bencana. Kolaborasi dari beberapa aktor sangat dibutuhkan agar efektif dan efisien. Dalam bidang pariwisata pihak utama yang menangani adalah Kementerian Pariwisata yang memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan destinasi dan industri pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan pariwisata, Dibawah Kementrian Pariwisata ada instansi di tingkat daerah provinsi dan kabupaten. Salah satu langkah strategis pemerintah dalam (Berliandaldo et al., 2023) adalah mengembangkan pariwisata yang tahan terhadap bencana dan aman dari dampaknya. Hal ini dilakukan dalam rangka melindungi investasi di sektor industri pariwisata, termasuk perekonomian masyarakat sekitar kawasan pariwisata, serta memberikan kenyamanan, perlindungan, dan keselamatan kepada wisatawan dan masyarakat sekitar dari dampak negatif bencana.

Perlunya menciptakan wisata berkelanjutan menurut (Maesaroh & Suwarno, 2022) yang didukung dengan kesiapan kelompok dan organisasi yang mempunyai keahlian dalam tanggap darurat diperlukan untuk mendukung banyaknya daya tarik wisata. Destinasi wisata yang memiliki risiko bencana tinggi perlu diwaspadai oleh masyarakat dan penegelola wisata dalam menerapkan salah satu prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan. Diperlukan juga pemahaman para pihak mengenai bagaimana mengutamakan keselamatan wisatawan pada khususnya masyarakat sekitar destinasi wisata. Masyarakat sekitar wisata berperan penting dalam mengurangi risiko bencana (Sutrisno & Harnedi, 2018) pendekatan masyarakat perlu dilakukan karena masyarakat setempat adalah pihak yang paling mengerahui kondisi sosial budaya, sehingga setiap kegiatan pembangunan memperhitungkan aspek sosial budaya yang berkembang di sekitar wilayah.

Dengan melibatkan masyarakat sejak awal, maka program pembangunan akan lebih mampu menyalurkan aspirasi masyarakat dengan sumber daya yang tersedia, sesuai dengan kemampuan yang ada, dan menjamin komitmen masyarakat karena adanya rasa kepemilikan yang besar. Sementara pariwisata akan menjadi industri yang rentan terhadap dampak bencana, sehingga untuk meminimalkan dampak, diperlukan suatu perencanaan dan pengembangan terhadap pendekatan tersebut.

Pemahaman masyarakat sekitar destinasi wisata dalam menerapkan wisata yang aman dari risiko bencana masih memiliki keterbatasan. Dalam penelitian (Situmorang, 2020) mengatakan bahwa kurangnya sosialisasi dari lembaga pemerintah atau non pemerintah yang memperburuk keadaan masyarakat yang terdampak bencana, membuat masyarakat dan pemerintah daerah di Indonesia tidak cukup siap dalam menghadapi bencana. Terbatasnya sumber daya, banyaknya korban bencana disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bencana dan kesiapan menghadapi bencana yang terjadi. Didukung (Mariana et al., 2018) Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan mengingat masyarakatlah yang melaksanakan berbagai kegiatan dalam pembangunan (termasuk subjek yang rentan menjadi korban bencana). Masyarakat memegang peranan penting sekaligus sebagai subjek dan objek pembangunan. Masalah penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama seperti dalam (Hijri et al., 2020) bahwa mengingat permasalahan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat sebagai bentuk partisipasinya, maka partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana pada hakikatnya sudah

dipraktekkan sejak lama dan identik dengan konsep penanggulangan bencana berbasis masyarakat.

Penelitian (Hutagalung & Sulistio, 2021) kemampuan dalam mengelola wisata oleh masyarakat harus ditingkatkan, masyarakat harus mengetahui dan memahami aspek-aspek dalam pengelolaan akan mempengaruhi pengalaman dan kesan wisatawan. Prinsip *Clean, Healthy, Safe, and Environmental Sustainability* (CHSE) harus diterapkan di seluruh destinasi wisata. Untuk menerapkan CHSE, Pokdarwis selaku pengelola pariwisata harus memahami manajemen pariwisata. Didukung oleh penelitian (Kurniawati, 2020) agar masyarakat dapat bertindak secara efektif, terdapat kebutuhan untuk mengurangi ketidakpastian, sehingga sosialisasi mitigasi bencana menjadi sangat penting. Instansi pemerintah maupun swasta yang sangat peduli terhadap kejadian bencana memerlukan informasi yang akurat dari para pemangku kepentingan, dalam hal ini pemerintah, guna mencegah terjadinya bencana. Beberapa hal yang harus diketahui oleh masyarakat dalam penelitian (Gede et al., 2023) memaparkan hal-hal yang perlu diketahui masyarakat dalam manajemen bencana di kawasan wisata adalah (1) Pengetahuan kebencanaan; (2) Kawasan rawan bencana; (3) Penanggulangan dan tata kelola bencana; (4) Teknik penanggulangan dan penanganan bencana; (5) Risiko bencana; dan (6) Pencarian dan Pertolongan. Fase berikutnya meliputi pengembangan keterampilan dalam pencarian dan penyelamatan, mitigasi bencana, kesiapsiagaan bencana, dan manajemen bencana melalui survei dan simulasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan risiko bencana dan memberikan masyarakat kontrol yang lebih besar dalam menanggapi risiko tersebut.

Program yang dilakukan dalam upaya pengurangan risiko bencana pada tingkat desa wisata diantaranya adalah PRBBK yang dijelaskan dalam (R. C. Wibowo et al., 2019) Pengurangan Risiko Berbasis Komunitas (PRBBK) merupakan metode yang mengakomodir masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. Peningkatan kapasitas melalui pemetaan bencana partisipatif merupakan salah satu cara untuk mengurangi hambatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Alternatif konsep dalam pengelolaan desa wisata yaitu *Community Based Tourism* (CBT) merupakan konsep yang mendukung kesejahteraan masyarakat lokal, karena masyarakat memegang pengelolaan secara penuh. Selain itu (Wibisono et al., 2023) memaparkan dengan kerentanan tersebut harus dikelola secara sistematis dan terlembaga, salah satunya melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana). Pelembagaan tersebut diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif dari bencana sehingga waktu pemulihan menjadi lebih singkat dan aktivitas ekonomi serta pengembangan wisata dapat kembali dilakukan sebagaimana mestinya. Destana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi berbagai acaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana (Perka BNPB No. 1 Tahun 2012). Konsep Destana menuntut seluruh komponen yang terdapat di dalam desa mulai dari pemerintah desa, masyarakat desa serta forum Peduli Risiko Bencana (PRB) mampu melakukan manajemen bencana untuk memperkecil risiko dari potensi bencana. Penelitian (Nugroho & Sucipto, 2020) mengharapkan masyarakat menjadi lebih mandiri dan sejahtera. Penting untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi

dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana. Agar perekonomian masyarakat tidak terkena dampak negatif apabila terjadi bencana dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap situasi darurat. Pengembangan pengetahuan mitigasi bencana diharapkan dapat menjadikan desa wisata sebagai tempat yang aman dan ramah bagi pengunjung.

Penanggulangan bencana di tempat wisata harus dilakukan oleh beberapa pihak yang berkolaborasi agar pelaksanaannya dapat maksimal, seperti dalam penelitian (Demantoro, 2019) menyebutkan perlunya pihak wisata mengembangkan wisata siaga bencana mengacu kepada *collaborative governance* agar bisa dilaksanakan dengan mudah oleh stekholder terkait, sehingga objek wisata mendapatkan penanganan bencana yang efektif dan efisien. Pemerintah berperan sebagai penanggungjawab terhadap kondisi ekonomi terkait bencana, penyedia fasilitas sarana dan prasarana publik dalam keadaan darurat. LSM berperan sebagai agenn perubahan sebagai sumber ilmu pengetahuan kebencanaan kepada masyarakat maupun wisatawan. Pelaku wisata merupakan subjek dan juga objek dari kesiapsiagaan bencana yang berhubungan secara langsung dengan risiko bencana. Mengenai kolaborasi dalam penanggulangan bencana di tempat wisata juga dipaparkan oleh (Shmueli et al., 2021) seluruh kelompok pemangku kepentingan melaksanakan kolaborasi dalam komponen perencanaan dan penetapan tingkat prioritas, khususnya dalam pelaksanaan kelangsungan usaha dan perencanaan bencana pada destinasi dan industri. Selain itu, industri pariwisata harus mampu menjaga kelestarian lingkungan agar dapat melaksanakan program prioritas penanganan bencana yang ada. Hal ini akan membantu mengurangi risiko

bencana di masa depan. Penerapan strategi kesiapsiagaan dan mitigasi memerlukan kolaborasi antar pemangku kepentingan sebagai bagian dari rencana terpadu. Rencana ini akan membantu proses pemulihan pasca bencana, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat mempertanggungjawabkan peran dan tanggung jawabnya masing-masing.

Didukung penelitian (Arfani, 2022) Kolaborasi sinergis berbagai pihak tidak bisa dipisahkan dari keberhasilan pengembangan sektor pariwisata. Landasan mendasar untuk mencapai pembangunan pariwisata adalah sinkronisasi berbagai sektor pariwisata. Peraturan Menteri (Permen) Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan menyatakan bahwa agar pariwisata memberikan keuntungan dan manfaat pada masyarakat dan lingkungannya maka perlu adanya interkoneksi sistem, subsistem, sektor, dan juga dimensi sehingga tercipta orkestrasi yang terintegrasi secara optimal baik peran *Business, Government, Community, Academic, and Media* (BGCAM) yang dikenal dengan Konsep Pentahelix. Kolaborasi berbagai pihak dalam pencegahan bencana dengan melakukan mitigasi bencana untuk menurunkan risiko bencana sama pentingnya dalam pengembangan industri pariwisata.

Dengan adanya kolaborasi maka dapat menentukan mitigasi bencana yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi di lapangan sesuai dengan penelitian (Nahak et al., 2018) memaparkan untuk menentukan konsep mitigasi apa yang dapat digunakan, kajian terhadap berbagai kondisi dapat dilakukan guna mengetahui seberapa besar kerusakan yang mungkin timbul akibat berbagai variasi

risiko bencana. Mitigasi terbagi menjadi dua dalam (Ginting & Putra, 2019) yaitu mitigasi struktural dan non struktural, mitigasi non struktural merupakan pelengkap dari mitigasi struktural sehingga saling menutupi dengan kelebihan dan kekurangannya. Tidak hanya itu kesiapsiagaan juga perlu di terapkan didukung penelitian (Buchari et al., 2021) bahwa pentingnya kawasan wisata mempunya jalur evakuasi yang dibuat berdasarkan pertimbangan keselamatan supaya pengunjung merasa aman dari risiko bencana. Jalur evakuasi ditentukan dengan kebutuhan masyarakat untuk meminimalisir kerugian dan jumlah korban dari bencana alam. Hal tersebut dikarenakan infrastruktur yang ada dapat menguatkan kesiapsiagaan dan meminimalisir kerentanan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Sesuai dengan konsep berkelanjutan dalam (Berliandaldo et al., 2023) kaitannya dengan pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata harus selaras dengan 4 konsep resiliensi berkelanjutan, yaitu meningkatkan budaya kesiapsiagaan bencana yang antisipatif, responsif, dan adaptif; berinvestasi dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi serta mengambil bagian dalam program pendanaan dan transfer teknologi; membangun infrastruktur tahan bencana terhadap perubahan iklim; dan komitmen bersama untuk memberlakukan perjanjian internasional. Maka risiko bencana bisa diminimalisir (Rif'an & Tyawati, 2020) risiko bencana (*disaster risk*) merupakan hasil dari analisis tiga variabel yaitu bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*). Adanya kegiatan pengembangan wisata di kawasan masyarakat lokal yang dhuni suatu komunitas tertentu dengan berbagai karakter sosial, budaya, dan ekonomi ditempatkan sebagai subjek, juga diperlukan pengembangan sebagai pelaku wisata.

Tabel 1.3 Pengelompokan Artikel Jurnal

No.	Kalsifikasi Tema	Hasil Penelitian
1.	Mitigasi Bencana di Kawasan Wisata	(Ni` maturrohmah et al., 2022), (Aldriani & Andra, 2020), (Ginting & Putra, 2019), (Arianto et al., 2022), (Rif'an & Tyawati, 2020), (Ariyani et al., 2023), (Gede et al., 2023), (Situmorang, 2020), (Buchari et al., 2021), (Budiatiningsih & Rosyidie, 2022), (Nahak et al., 2018), (Pahleviannur et al., 2020) hasil penelitian masih banyak destinasi wisata yang masih kurang menerapkan mitigasi bencana tetapi ada beberapa yang sudah bagus dalam meminimalisir risiko bencana.
2.	Peran Pemerintah Dalam Mitigasi Bencana di Kawasan Wisata	(E. S. Wahyuni et al., 2020), (Kurniasari, 2017), (Hijri et al., 2020) mengemukakan bahwa pemerintah selaku pemangku kepentingan sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan mengenai wisata dan penanggulangan bencana, baik itu pemerintah pusat melalui kementerian pariwisata dan pemerintah daerah. Terutama BNPB dan BPBD sebagai lembaga pemerintah dibidang penanggulangan bencana.
3.	Mitigasi Bencana Kawasan Wisata Berbasis Komunitas dan Masyarakat	(Hijrawadi et al., 2022), (Wibisono et al., 2023), (Pucangan & Arimbawa, 2020), (Sutrisno & Harnedi, 2018), (Maesaroh & Suwarno, 2022), (Mariana et al., 2018), (Kurniawati, 2020), (Demantoro, 2019), (R. C. Wibowo et al., 2020), (Shalih et al., 2019), (Hutagalung & Sulistio, 2021), (Rahman et al., 2022), (Nugroho & Sucipto, 2020) mengemukakan masih banyaknya masyarakat yang kurang paham akan adanya risiko bencana, namun sudah adanya upaya mitigasi bencana yang melibatkan masyarakat di sekitar kawasan wisata, masyarakat dalam hal ini sebagai objek dan subjek dalam mitigasi bencana di kawasan wisata. Dengan adanya konsep <i>Community Based Tourism (CBT)</i> dan komunitas pariwisata lokal juga berperan dalam mitigasi bencana di kawasan wisata.

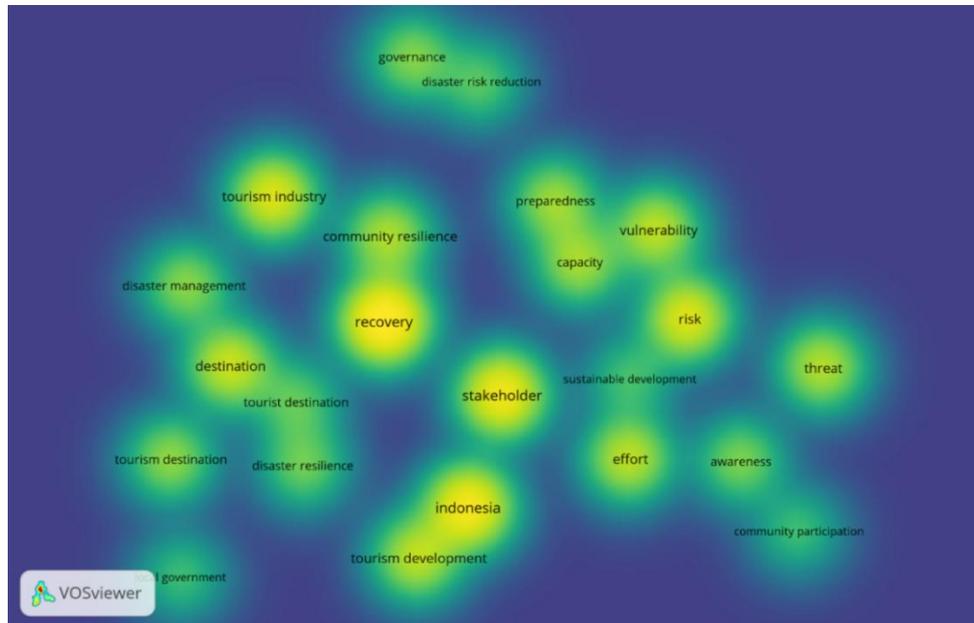
4.	Kolaborasi Dalam Penanggulangan Bencana di Kawasan Wisata	(Shmueli et al., 2021), (Yumantoko, 2017), (Arfani, 2022), (Berliandaldo et al., 2023) kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, swasta, universitas, dan <i>civil society</i> diperlukan dalam penanggulangan bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana agar efektif dan efisien
----	---	---

Sumber : Diolah oleh Penulis (2023)

Berdasarkan penjelasan pada tabel 1.1 di atas Penelitian tentang Wisata Aman Bencana di Kawasan Wisata terbagi menjadi 4 kelompok yaitu Mitigasi Bencana di Kawasan Wisata, Peran Pemerintah Dalam Mitigasi Bencana di Kawasan Wisata, Mitigasi Bencana Kawasan Wisata Berbasis Komunitas dan Masyarakat, dan Kolaborasi Dalam Penanggulangan Bencana di Kawasan Wisata. Namun belum ada penelitian secara konperhensif meneliti tentang Peranan Komunitas Lokal dalam Pengembang Pariwisata Aman Bencana di Kabupaten Bantul. Oleh karena itu peneliti berfokus membahas mengenai Pengembangan Wisata Aman Bencana Berbasis Komunitas Lokal Melalui *Community Based Tourisam* di Kabupaten Bantul.

Selanjutnya penelitian ini menggunakan bantuan *software* VOSviewers untuk memperlihatkan literature review secara visual, data yang didapat dari scopus. Peneliti menggunakan kata kunci dalam menggunakan *VOSviewrs* yaitu: *Community, Tourism, and Disaster* dengan batas 5 tahun terakhir 2018-2023 memperoleh 292 artikel jurnal.

Gambar 1.3 Visualisasi VOSviewer



Sumber: Diolah oleh Penulis (2023)

Berdasarkan gambar 1.3 hasil analisis VOSviewers berkaitan dengan kata kunci *Community, Tourism, and Disaster* pada scopus database menunjukkan bahwa semakin kuning kata kunci menunjukkan sudah banyak penelitian yang telah dilakukan. Sedangkan semakin hijau maka peluang semakin besar untuk dilakukannya penelitian. Topik *Tourism Devolpment, Stakeholder, Recovery*, dan *Indonesia* menjadi topik yang sudah sering dibahas. Topik *Community Participation, Disaster Management, Preparadnes*, dan *Disaster Resilience* merupakan topik yang jarang dibahas. Oleh karena itu, peneliti berfokus pada Pengembangan Pariwisata Aman Bencana Berbasis Komunitas Lokal. Hal ini menjadi *novelty* atau kebaruaran dalam penelitian.

F. Kerangka Teori

1. Desa Wisata

Pariwisata dalam bahasa sansekerta berasal dari kata "Pari" yang memiliki arti penuh, dan "Wisata" yang berarti perjalanan. Menurut Baharuddin 2008 dalam (Suryani, 2017) pariwisata adalah pergerakan sementara oleh individu atau kelompok dari satu lokasi ke lokasi lain dengan tujuan murni menikmati perjalanan untuk waktu luang dan tamasya. *World Tourism Organization* mendefinisikan pariwisata sebagai kegiatan yang melakukan perjalanan untuk berlibur, urusan bisnis, atau alasan lain dan tinggal paling lama satu tahun di suatu tempat selain tempat tinggalnya yang biasa. Konsep pariwisata pedesaan dengan produk-produknya yang unik, khas, dan ramah lingkungan berpotensi menjadi solusi baru bagi pertumbuhan pariwisata (Susyanti & Latianingsih, 2017).

Secara umum desa wisata merupakan kawasan pedesaan yang memiliki beberapa keunikan untuk menarik wisatawan. Menurut (Hadiwijoyo, 2012) Desa Wisata adalah kawasan pedesaan yang mempunyai keseluruhan suasana yang unik dan khas dari segi sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, dan kehidupan sehari-hari, serta arsitektur bangunan yang unik, kegiatan ekonomi yang menarik, dan potensi pengembangan fasilitas bagi wisatawan seperti atraksi, penginapan, makanan, minuman, dan keperluan lainnya. Nuryanti (1992) dalam (Sidiq & Resnawaty, 2017) mendefinisikan desa wisata merupakan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang terpadu dengan

tata cara dan tradisi yang berlaku serta menyajikan atraksi, akomodasi, dan fasilitas penunjang.

Perkembangan pariwisata di Indonesia sangat bergantung pada keberadaan desa wisata. Destinasi suatu kawasan wisata bisa lebih bervariasi dengan adanya desa wisata. Pertumbuhan sektor pariwisata dalam hal ini desa wisata memberikan dampak terhadap perekonomian suatu daerah melalui beberapa hal, antara lain meningkatkan pendapatan, menyerap tenaga kerja masyarakat, meningkatkan pendapatan pemerintah desa, meningkatkan permintaan terhadap barang-barang lokal, dan meningkatkan fasilitas masyarakat (Febriana & Pangestuti, 2018). Berkembangnya desa wisata didorong oleh tiga faktor. Faktor pertama adalah potensi sumber daya alam dan budaya yang lebih otentik di pedesaan. Daerah pedesaan masih menjalankan adat dan ritual budaya, dan topografinya secara umum selaras. Berbeda dengan daerah perkotaan, daerah pedesaan mempunyai lingkungan fisik yang lebih alami atau belum tercemar oleh berbagai jenis pencemaran. Faktor ketiga adalah, sampai batas tertentu, daerah pedesaan mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif lambat, sehingga menghambat masyarakat lokal untuk sepenuhnya menyadari potensi ekonomi, sosial, dan budaya (Damanik, 2013).

Menurut Dinas Pariwisata DIY suatu desa dapat dijadikan daerah tujuan wisata jika memenuhi syarat dan faktor pendukung sebagai berikut: pertama, mempunyai potensi produk atau daya tarik

yang khas dan khas yang dapat dijadikan daya tarik wisata. Lingkungan alam dan kehidupan sosial budaya lingkungan sekitar merupakan dua contoh potensi tersebut. Kedua, mendukung pengelolaan desa wisata dengan sumber daya manusia (SDM) lokal yang memadai dan berkualitas. Faktor ketiga adalah akses terhadap peluang pasar. Faktor ini penting karena tanpa akses pasar atau wisatawan, desa yang siap dikembangkan menjadi desa wisata tidak ada gunanya. Faktor keempat adalah potensi sumber daya manusia lokal dalam mendukung peluang akses wisatawan. Kelima, mempunyai lokasi yang bisa dikembangkan fasilitas-fasilitas yang membantu desa wisata, seperti homestay, area pelayanan publik, area kesenian, dan lain sebagainya (D. Wahyuni, 2018).

Penelitian (Setiawan, 2020) mengemukakan prinsip pengembangan Desa Wisata adalah salah satu produk alternative yang dapat memberikan dorongan bagi pembangunan pedesaan yang berkelanjutan serta memiliki prinsip-prinsip pengelolaan sebagai berikut :

- a. Memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat
- b. Menguntungkan masyarakat setempat
- c. Berskala kecil untuk memudahkan terjalinnya hubungan timbal balik dengan masyarakat setempat
- d. Melibatkan masyarakat setempat
- e. Menerapkan pengembangan produk wisata pedesaan.

Prinsip pengembangan desa wisata diatas menggunakan masyarakat sebagai subjek dan juga objek. Sedangkan kriteria yang mendasari prinsip pengelolaan Desa Wisata yaitu :

- a. Penyediaan fasilitas dan prasarana yang dimiliki masyarakat lokal biasanya mendorong peran serta masyarakat dan menjamin adanya akses ke sumber fisik merupakan batu loncatan untuk berkembangnya Desa Wisata.
- b. Mendorong peningkatan pendapatan dari sektor pertanian dan kegiatan ekonomi tradisional lainnya.
- c. Penduduk setempat memiliki peranan yang efektif dalam proses pembuatan keputusan tentang bentuk pariwisata yang memanfaatkan kawasan lingkungan dan penduduk setempat memperoleh pembagian pendapatan yang pantas dari kegiatan pariwisata.
- d. Mendorong perkembangan kewirausahaan masyarakat setempat.

Salah satu cara untuk melaksanakan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan adalah melalui desa wisata. Diharapkan dengan terciptanya desa wisata akan tercapai kesetaraan sejalan dengan gagasan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Selain itu, pengembangan desa wisata mempunyai nilai budaya tanpa merusaknya karena meningkatkan nilai produk wisata terhadap budaya pedesaan. Kelompok kecil pengunjung tinggal di dalam atau dekat dengan lingkungan tradisional

atau di desa-desa terpencil sebagai bagian dari wisata desa untuk belajar tentang kehidupan desa dan daerah sekitarnya (Gautama et al., 2020).

2. Pengembangan Pariwisata Aman Bencana

Bencana atau *disaster* menurut WHO (*World Health Organization*) adalah setiap peristiwa yang memerlukan bantuan dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena dampak dan mengakibatkan kerugian, gangguan ekologi, hilangnya nyawa manusia, memburuknya status kesehatan, atau memburuknya pelayanan kesehatan. Bencana adalah peristiwa dan keadaan berbahaya yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Tergantung pada tingkat keparahannya, suatu bencana berpotensi mengganggu rutinitas sehari-hari, menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, menghancurkan harta benda dan kehidupan manusia, merugikan tatanan sosial masyarakat, dan mengubah pola hidup suatu masyarakat (Soedarmadji & Wahid, 2021). Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang membahayakan dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non alam, atau manusia sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan hidup, kerugian harta benda, dan efek lainnya. psikologis. Bencana merupakan pertemuan dari tiga unsur, yaitu ancaman bencana, kerentanan, dan kemampuan yang dipicu oleh suatu kejadian.

Program pariwisata aman bencana dilaksanakan dengan meningkatkan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan pengelolaan pariwisata. Sebagai bagian

dari upaya kesiapsiagaan tersebut, telah dipasang prosedur, peta evakuasi, dan perangkat peringatan dini di destinasi wisata. Sehingga baik pengelola maupun pengunjung sadar akan tindakan yang harus segera dilakukan ketika terjadi bencana. Selama hal ini berlangsung, kegiatan pengurangan risiko bencana yang didukung oleh praktik pengelolaan objek wisata berkelanjutan digunakan untuk melakukan upaya mitigasi. Dengan adanya program ini, calon pengunjung akan semakin percaya diri dan tertarik mengunjungi destinasi wisata populer (Rahman et al., 2022). Pariwisata aman bencana merupakan pariwisata yang menerapkan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan di daerah wisatanya. Menurut siaran pers Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif alat ukur dan profil resiliensi pariwisata aman bencana adalah dari segi risiko atau berdasarkan kuantitas catatan atau pengalaman kejadian bencana (Hendriyani, 2023).

Menurut World Bank dalam (Berliandaldo et al., 2023), terdapat 5 langkah dalam membangun pariwisata Tangguh bencana yaitu Memahami Risiko (*Understanding Risk*), Perencanaan dan Prioritas (*Planning & Prioritization*), Mitigasi dan Kesiapsiagaan (*Mitigation and Preparedness*), Tanggapan dan Pemulihan (*Response and Recovery*), dan Tindakan Ketahanan Jangka Panjang (*Long-Term Resilience Actions*). Tindakan-tindakan ini dapat meningkatkan daya saing, inovasi, investasi, penghematan biaya, dan reputasi sekaligus meningkatkan ketahanan. Selain itu, menghasilkan manfaat yang sinergis bagi lingkungan secara

keseluruhan, seperti menurunkan polusi dan emisi gas rumah kaca, serta menumbuhkan ketahanan masyarakat dalam suatu tujuan.

- a. Memahami Risiko: Mengidentifikasi risiko bencana dan iklim yang mengancam sektor pariwisata dan menganalisis potensi dampak terhadap destinasi dan industri.
- b. Perencanaan dan Prioritas: Merencanakan dan memprioritaskan pengembangan dan investasi pariwisata untuk membangun ketahanan dan meminimalisir dampak negatif di destinasi dan industri.
- c. Mitigasi dan Kesiapsiagaan: Menerapkan langkah langkah ketahanan pra bencana untuk mengurangi dampak dan membantu destinasi dan industri pulih
- d. Tanggapan dan Pemulihan: Mengambil keputusan dan tindakan respon yang baik selama dan setelah terjadi bencana untuk meminimalkan kerugian dan dapat mempertahankan
- e. Tindakan Jangka Panjang: Merencanakan keberlanjutan jangka panjang sektor ini melalui tindakan mitigasi bencana dan perubahan iklim.

Siklus di atas berdampak pada tumbuhnya ketahanan terhadap bencana.

Tahap prabencana, saat bencana, dan tahap pascabencana merupakan tahapan-tahapan yang masuk dalam payung penanggulangan bencana (Pahleviannur et al., 2020). Tindakan tersebut sejalan dengan kepentingan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, dunia usaha,

lembaga pembangunan, dan pemangku kepentingan lainnya, dan telah diatur dalam kebijakan pencegahan bencana.

3. Komunitas Lokal

Manusia sebagai makhluk sosial pastinya tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain atau masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat ada sesuatu yang dikenal sebagai komunitas dalam suatu kelompok sosial, meskipun tidak semua orang mengetahui definisi pastinya. Komunitas cenderung terbentuk dalam kelompok tertentu, biasanya atas nama dan mewakili suatu bidang, tokoh, dan lain sebagainya sesuai dengan preferensi kelompok tersebut. Komunitas berasal dari bahasa latin *communitas* yang berarti “kesamaan”, kemudian dapat diturunkan dari *communis* yang berarti “sama, publik, dibagi oleh semua atau banyak” . Menurut KBBI Komunitas adalah kumpulan organisme (termasuk manusia dan makhluk hidup lainnya) yang hidup berdampingan dan berkomunikasi dalam suatu ruang tertentu. Selain itu, KBBI juga mendefinisikan komunitas juga dapat diartikan sebagai sekelompok orang atau organisasi. Komunitas adalah sekelompok orang yang secara teratur berinteraksi satu sama lain sehingga setiap orang dalam kelompok tersebut saling mengenal satu sama lain dan mempunyai masalah, minat, dan keprihatinan yang sama (Wenger et al., 2002).

Menurut (Israel et al., 2012) dalam kajiannya mendefinisikan komunitas sebagai individu-individu yang ingin memenuhi kebutuhan bersama dan memiliki kesamaan rasa emosional yang saling terkoneksi

dengan nilai, norma, minat yang sama. Pengertian komunitas menurut (Kartajaya, 2003) komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari biasanya, dimana dalam suatu komunitas, terdapat hubungan pribadi yang erat antar anggota komunitas karena mempunyai kesamaan minat atau nilai. Dapat disimpulkan bahwa komunitas adalah suatu kelompok sosial dalam masyarakat yang terdiri dari sejumlah orang yang berinteraksi satu sama lain dalam lingkungan tertentu. Orang-orang dalam komunitas mempunyai latar belakang, minat, keterampilan, dan tujuan yang sama. Oleh karena itu, komunitas memiliki ikatan yang kuat. Berikut merupakan kekuatan pengikat komunitas:

- a. Memudahkan dalam berkoordinasi antar individu.
- b. Antar individu dapat saling memberi semangat dan motivasi.
- c. Mampu meningkatkan kesejahteraan dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan
- d. Mampu meningkatkan dan memperbaiki kehidupan masyarakat dan kelompok baik di bidang ekonomi maupun sosial.
- e. Penggunaan sumber-sumber daya alam dan potensi yang ada lebih efektif dan efisien.
- f. Proses pembangunan lebih demokratis dan aspiratif karena melibatkan banyak orang.

Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan didukung oleh keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan. Faktanya, komunitas lokal memainkan peran penting dalam pertumbuhan industri pariwisata.

Pembangunan akan berjalan lancar jika masyarakat setempat mendukungnya. Berikut cara masyarakat menurut (M. S. Wibowo & Belia, 2023) dapat terlibat dalam proses perencanaan pengembangan pariwisata:

- a. Masyarakat lokal harus didukung secara finansial untuk berinvestasi dalam pengembangan pariwisata.
- b. Masyarakat lokal berperan penting sebagai enterpreneur.
- c. Masyarakat lokal harus dilibatkan saat pembuatan kebijakan tentang pariwisata.
- d. Masyarakat lokal dilibatkan dalam pengambilan keputusan akhir yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.
- e. Masyarakat harus punya suara saat proses pengambilan keputusan.

Komunitas lokal merupakan pelaku utama dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Mereka harus mendapatkan keuntungan dari perluasan sektor pariwisata lokal. Baik dampak tidak langsung positif maupun negatif terhadap masyarakat lokal akan dihasilkan oleh industri pariwisata. Dengan mengutamakan kepentingan kelompok masyarakat, partisipasi masyarakat dapat berperan sebagai agen yang mempunyai kekuatan untuk mengubah struktur pembangunan pariwisata. Dengan kata lain, upaya-upaya ini mempunyai kapasitas untuk memberikan dampak pada pemangku kepentingan perencanaan pembangunan dan mendorong transformasi masyarakat.

4. *Community Based Tourism (CBT)*

Dengan adanya komunitas atau masyarakat yang memiliki ketertarikan dan tujuan mengenai pengembangan wisata maka munculnya pariwisata berbasis masyarakat *Community Based Tourism (CBT)*. Ide pariwisata berbasis komunitas lahir dari keinginan pemerintah untuk mencari ide-ide baru pengembangan pariwisata yang fokus pada nilai-nilai menjaga lingkungan dan budaya lokal sekaligus menawarkan manfaat jangka panjang (Jamalina & Wardani, 2017). Untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan, pariwisata berbasis masyarakat menggunakan partisipasi masyarakat sebagai komponen utamanya Telfer dan Sharpley dalam (Adikampana, 2017). *Community based tourism (CBT)* dapat dartikan sebagai alat atau metode pengembangan masyarakat yang meningkatkan kapasitas masyarakat lokal atau pedesaan untuk mengelola sumber daya pariwisata sekaligus memastikan keterlibatan masyarakat lokal. Pariwisata yang dikenal sebagai *Community Based Tourism (CBT)* mencakup pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan dan bertujuan untuk memberikan masyarakat lokal alat yang dibutuhkan untuk mengelola pertumbuhan pariwisata dan memenuhi aspirasi untuk kesejahteraan masyarakat sendiri. Komunitas lokal dapat memperoleh manfaat dari pariwisata berbasis komunitas dengan meningkatkan pendapatan, mendiversifikasi perekonomian, melestarikan budaya, melindungi lingkungan, dan menawarkan kesempatan pendidikan (Permatasari, 2022).

Pengembangan CBT atau pariwisata berbasis komunitas/masyarakat memiliki dampak positif jika dikembangkan dengan baik dalam pengembangan suatu daerah wisata. Karena melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pengambilan keputusan pariwisatanya. *Multiplier effect* dari adanya pengembangan pariwisata berbasis komunitas/masyarakat diantaranya yaitu munculnya lapangan pekerjaan baru dan pendapatan baru serta pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat sekitar tempat wisata. Ketika pariwisata berbasis komunitas benar-benar dipraktikkan, muncullah bisnis-bisnis baru seperti toko souvenir, homestay, dan hotel. Sejalan dengan pertumbuhan dan kontribusi industri pariwisata melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, pembangunan daerah, serta dalam menyerap investasi dan tenaga kerja serta pengembangan usaha, maka peran sektor pariwisata nasional semakin besar (Diana & Setiawan, 2021).

Menurut Hatton 1999 dalam (Suganda, 2018) ada empat kategori prinsip CBT adalah sosial, ekonomi, budaya, dan politik.

- a. Prinsip sosial berkaitan dengan otorisasi kepada komunitas untuk memberi izin, mendukung, membangun, dan mengoperasikan kegiatan wisata yang ada di wilayahnya.
- b. Prinsip ekonomi menjelaskan terkait pembagian keuntungan dari usaha pariwisata untuk komunitas dan usaha kecil menengah yang merekrut tenaga kerja dari komunitas.

- c. Prinsip budaya mensyaratkan adanya upaya menghargai budaya lokal, *heritage* dan tradisi dalam kegiatan pariwisata.
- d. Prinsip politik berkaitan dengan peran pemerintah lokal dan regional diantaranya dalam membuat kebijakan sehingga prinsip sosial, ekonomi, dan budaya dapat terlaksana.

Pengembangan wisata dengan konsep CBT menurut (Sunaryo, 2013) memiliki tiga prinsip pokok dalam strategi perencanaan pembangunan kepariwisataan yang berbasis pada masyarakat atau *community based tourism*, yaitu :

- a. Mengikutsertakan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan.
- b. Adanya kepastian masyarakat lokal menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan.
- c. Pendidikan kepariwisataan bagi masyarakat lokal.

Pengembangan CBT menurut Sunaryo diatas masyarakat bukan lagi menjadi obyek pembangunan akan tetapi sebagai penentu pembangunan itu sendiri, masyarakat akan mampu mengentaskan dirinya sendiri dari kemiskinan dan mengurangi tingkat ketergantungan pada faktor eksternal.

Adapun aspek utama pengembangan *community based tourism* menurut Suansri dalam (Arifin, 2017) terdapat lima dimensi indikator yaitu:

- a. Dimensi Ekonomi: Adanya dana untuk pengembangan komunitas, terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata. Timbulnya pendapatan masyarakat lokal dari sektor pariwisata.

- b. Dimensi Sosial: Meningkatkan kualitas hidup, kebanggaan komunitas dan pembagian peran yang adil antara laki-laki, perempuan, generasi muda dan tua serta membangun penguatan organisasi komunitas.
- c. Dimensi Budaya: Mendorong masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda, membantu berkembangnya pertukaran budaya, dan budaya pembangunan melekat erat dalam budaya lokal.
- d. Dimensi Lingkungan: Mempelajari carrying capacity area, mengatur pembuangan sampah, dan meningkatkan keperdulian akan perlu konservasi.
- e. Dimensi Politik: Meningkatkan partisipasi dari penduduk lokal, peningkatan kekuasaan komunitas yang lebih luas, dan jaminan hak-hak pengelolaan SDA.

Setiap masyarakat harus didorong untuk mengidentifikasi tujuan sendiri dan mengarahkan pariwisata untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat lokal. Untuk itu dibutuhkan perencanaan dan industri pariwisata yang memperhatikan wisatawan dan juga masyarakat setempat. Sehingga prinsip-prinsip dasar dalam penerapan konsep *Community Based Tourism* (CBT) terbagi menjadi prinsip ekonomi, prinsip sosial, prinsip budaya, prinsip politik, dan prinsip lingkungan.

G. Definisi Konseptual

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini untuk membahas Pengembangan Pariwisata Aman Bencana Berbasis Komunitas Lokal Melalui *Community Based* di Kabupaten Bantul:

1. Desa Wisata

Desa wisata yaitu pariwisata yang memanfaatkan potensi berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya kearifan lokal yang ditujukan untuk wisata pada tingkat desa. Desa wisata diberdayakan oleh masyarakat desa itu sendiri.

2. Pengembangan Pariwisata Aman Bencana

Pengembangan pariwisata aman bencana adalah pariwisata yang mengembangkan mahaem bencana terutama mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang ada di tempat wisata. Baik itu bencana alam ataupun non-alam. Dengan tujuan menciptakan rasa aman dan nyaman pengunjung wisata.

3. Komunitas Lokal

Komunitas merupakan kumpulan dari individu yang saling berinteraksi dan memiliki tujuan yang sama. Sedangkan komunitas lokal yaitu komunitas yang berada di lingkup yang sama seperti desa atau kota.

4. *Community Based Tourism* (CBT)

Community Based Tourism (CBT) adalah pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan pariwisata dimana masyarakat ditempatkan sebagai aktor utama. Sehingga masyarakat memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari kegiatan pariwisata.

H. Definisi Oprasional

Definisi operasional sebagai alur dalam melakukan penelitian. Definisi operasional ini disusun dan dibuat untuk mengidentifikasi pariwisata aman bencana dengan konsep komunitas berdasarkan permasalahan yang diangkat penulis, serta menguraikan secara singkat dan jelas alur penelitian yang akan dibuat.

Tabel 1.4 Oprasional Penelitian

No.	Variabel	Indikator	Parameter
1.	<i>Community Based Tourism (CBT)</i>	Ekonomi	<ol style="list-style-type: none">1) Terdapat lapangan pekerjaan di sektor pariwisata Desa Kaki Langit dan Wukirsari.2) Adanya pendapatan masyarakat dari Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari.3) Adanya dana pengembangan komunitas Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari.
		Sosial	<ol style="list-style-type: none">1) Meningkatkan kualitas hidup dan kebanggaan komunitas Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari2) Pembagian peran yang adil dalam komunitas dan penguatan organisasi komunitas Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari
		Budaya	<ol style="list-style-type: none">1) Menghormati budaya yang berbeda dan berkembangnya pertukaran budaya di Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari2) Budaya pembangunan melekat erat dalam budaya lokal di Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari
		Lingkungan	<ol style="list-style-type: none">1) Memperhatikan konservasi lingkungan di daerah Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari.2) Pengelolaan sampah yang baik oleh pihak Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari.

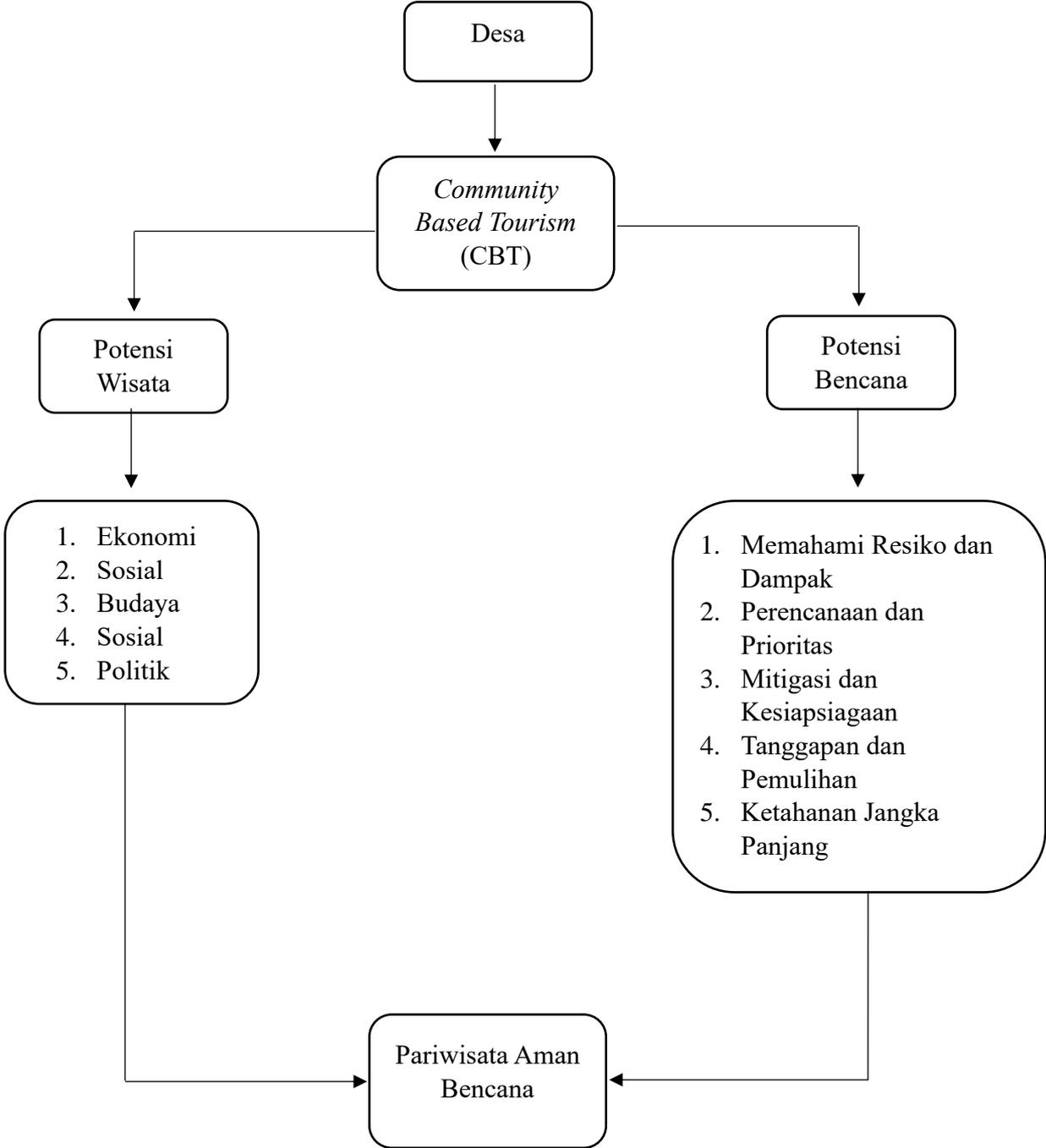
		Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan partisipasi penduduk lokal dan peningkatan kekuasaan komunitas yang lebih luas desa wisata Kaki Langit dan Wukirsari 2) Jaminan hak-hak pengelolaan sumber daya alam Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari
2	Pengembangan Pariwisata Aman Bencana Berbasis Komunitas Lokal	Memahami Risiko & Dampak	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemahaman risiko bencana yang ada di Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari. 2) Pemahaman dampak bencana di Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari.
		Perencanaan dan Prioritas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengintegrasikan pertimbangan risiko bencana dan iklim ke dalam kebijakan pariwisata di Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari. 2) Menanamkan pariwisata dalam perencanaan penanggulangan bencana nasional dan lokal di Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari.
		Mitigasi dan Kesiapsiagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menerapkan sistem peringatan dini dan komunikasi yang disesuaikan dengan pariwisata di Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari. 2) Insfrastruktur pariwisata yang tahan bencana di Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari.
		Tanggapan dan Pemulihan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengetahui keputusan dan tindakan respon yang baik selama dan setelah terjadi bencana di Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari. 2) Memberikan program dukungan kepada kelompok rentan (perempuan, anak-anak, lansia wiraswasta dan

			UKM) di Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari.
		Tindakan Ketahanan Jangka Panjang	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya rencana jangka panjang melalui tindakan mengurangi risiko bencana dan perubahan iklim di Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari. 2) Adanya konservasi lingkungan untuk mengurangi risiko bencana di Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari

Sumber: Diolah oleh Penulis (2023)

I. Kerangka Berfikir

Gambar 1.4 Kerangka Berfikir



Sumber: Diolah oleh Penulis (2023)

Kerangka berfikir diatas menjelaskan hubungan antar variabel pada penelitian ini. Desa sebagai objek utama yang memiliki potensi wisata dan potensi bencana, dan adanya komunitas lokal di desa dapat memeberikan peran. Pengembangan potensi wisata dan menghasilkan Desa Wisata Kaki Langit dan Desa Wisata Wukirsari. Selain memiliki potensi wisata, Desa Wisata Kaki Langit dan Desa Wisata Wukirsari berada di daerah rawan bencana. Konsep *Community Based Tourism* (CBT) diterpkan di Desa Wisata Kaki Langit dan Desa Wisata Wukirsari. Dengan adanya potensi bencana diperlukan pengembangan pariwisata aman bencana yang mewujudkan pariwisata aman bencana.

J. Metode Penelitian

Metode penelitian sebagai suatu pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan informasi dengan tujuan mampu mendeskripsikan, membuktikan, mengembangkan, dan menemukan teori, serta untuk memahami, mengatasi, dan meramalkan permasalahan dalam pengembagn pariwisata aman bencana. Dalam penelitain ini metode penelitian digunakan untuk menyajikan fakta dan mencari solusi atas suatu permasalahan dalam kontesk ini adalah risiko bencana. Metode penelitian yang tepat dan cocok diperlukan untuk memperjelas permasalahan dalam penelitian yang akan diteliti dan memperoleh jawaban yang tepat.

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif studi kasus digunakan dalam penelitian ini sebagai metode penelitian yang mendalam terhadap individu, masyarakat atau komunitas, dan suatu program kegiatan. Pendekatan kualitatif studi kasus ini digunakan untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah etentitas. Oleh karena itu, berkembangnya asumsi-asumsi mendasar menandai

dimulainya proses penelitian pendekatan kualitatif. Hal ini kemudian dihubungkan dengan penggunaan logika penelitian yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata aman bencana. Dengan bantuan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Hal ini mencakup memberikan penjelasan berbasis linguistik dan alami mengenai perilaku, persepsi, dan fenomena terkait pengembangan pariwisata aman bencana berbasis komunitas lokal melalui *community based tourism*.

2. Lokasi Penelitian

Terdapat 2 lokasi yang digunakan peneliti sebagai studi kasus dalam penelitian ini. Studi kasus yang diambil merupakan desa wisata yang berada di kawasan rawan bencana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.5 Lokasi Penelitian

No.	Lokasi Penelitian	Alamat Penelitian	Pertimbangan
1.	Desa Wisata Kaki Langit	Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (55783)	1) Nominasi 50 besar Anugrah Desa Wisata Indonesia 2021 2) Berada di Daerah Rawan Bencana 3) Jumlah Kunjungan 61.468 Terbanyak Ke-2 Selama Tahun 2019
2.	Desa Wisata Wukirsari	Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (55782)	1) Juara 1 Desa Wisata Se-DIY 2020 2) Peringkat 100 ADWI 2022 3) Berada di Daerah Rawan Bencana 4) Jumlah Kunjungan 30.750 Terbanyak Ke-4 Selama Tahun 2019

Sumber: Diolah oleh Penulis (2023)

3) Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber data utama. Dalam penelitian ini data primer didapatkan dari semua informasi yang berkaitan langsung dengan pengembangan pariwisata aman bencana berbasis komunitas lokal melalui *community based tourism*.

Tabel 1.6 Data Primer

No.	Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Lapangan pekerjaan di sektor pariwisata, pendapatan masyarakat, dana pengembangan komunitas Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari.	1) Dinas Pariwisata Kab. Bantul 2) Lurah Mangunan dan Wukirsari 3) Ketua Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari 4) Komunitas Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari 5) Masyarakat Desa Mangunan dan Wukirsari	Wawancara
2.	Meningkatkan kualitas hidup, kebanggaan komunitas, pembagian peran yang adil dalam komunitas, penguatan organisasi komunitas Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari	1) Dinas Pariwisata Kab. Bantul 2) Lurah Mangunan dan Wukirsari 3) Ketua Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirari 4) Komunitas Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari	Wawancara

		5) Masyarakat Desa Mangunan dan Wukirsari	
3.	Menghormati budaya yang berbeda, berkembangnya pertukaran budaya, budaya pembangunan melekat erat dalam budaya lokal di Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari	1) Dinas Pariwisata Kab. Bantul 2) Kepala Desa Mangunan dan Wukirsari 3) Ketua Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari	Wawancara
4.	Memperhatikan konservasi lingkungan, pengelolaan sampah yang baik oleh pihak Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari.	1) Dinas Pariwisata Kab. Bantul 2) Lurah Mangunan dan Wukirsari 3) Ketua Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari	Wawancara
5.	Partisipasi penduduk lokal, peningkatan kekuasaan komunitas yang lebih luas, jaminan hak-hak pengelolaan sumber daya alam Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari	1) Dinas Pariwisata Kab. Bantul 2) Lurah Mangunan dan Wukirsari 3) Ketua Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari 4) Masyarakat Desa Mangunan dan Wukirsari	Wawancara
6.	Pemahaman risiko dan dampak bencana di Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari.	1) Dinas Pariwisata Kab. Bantul 2) BPBD Kab. Bantul 3) Lurah Mangunan dan Wukirsari 4) Ketua Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari 5) Komunitas Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari 6) Masyarakat Desa Mangunan dan Wukirsari	Wawancara
7.	Kebijakan mempertimbangkan risiko bencana,	1) Dinas Pariwisata Kab. Bantul 2) BPBD Kab. Bantul	Wawancara

	perencanaan penanggulangan bencana, dan menjaga kelestarian alam di Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari.	3) Lurah Mangunan dan Wukirsari 4) Ketua Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari	
8.	Sistem peringatan dini bencana, komunikasi bencana dan infrastruktur bencana di Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari.	1) Dinas Pariwisata Kab. Bantul 2) BPBD Kab. Bantul 3) Lurah Mangunan dan Wukirsari 4) Ketua Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari 5) Komunitas Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari	Wawancara
9.	Keputusan dan tindakan respon yang baik selama dan setelah terjadi bencana dan program dukungan kepada kelompok rentan, termasuk bisnis milik perempuan, wiraswasta atau pekerja informal, dan UKM di Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari.	1) Dinas Pariwisata Kab. Bantul 2) Kepala BPBD Kab. Bantul 3) Lurah Mangunan dan Wukirsari 4) Ketua Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari 5) Komunitas Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari	Wawancara
10.	Rencana jangka panjang melalui tindakan mengurangi risiko bencana dan perubahan iklim dan konservasi lingkungan untuk meminimalisir bencana di Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari.	1) Dinas Pariwisata Kab. Bantul 2) Kepala BPBD Kab. Bantul 3) Lurah Mangunan dan Wukirsari 4) Ketua Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari 5) Komunitas Desa Wisata Kaki Langit dan Wukirsari	Wawancara

Sumber: Diolah oleh Penulis (2023)

b. Data Sekunder

Data sekunder sebagai data yang melengkapi data primer yang berasal dari sumber data tertulis seperti: buku, jurnal ilmiah, skripsi, berita, dan dokumen-dokumen lain yang sesuai dengan topik pembahasan pengembangan pariwisata aman bencana berbasis komunitas lokal melalui *community based tourism*.

Tabel 1.7 Data Sekunder

No.	Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Data Wisata Kab. Bantul	Dinas Pariwisata Kab. Bantul	Dokumentasi
2.	Data Kejadian Bencana	BPBD Kab. Bantul	Dokumentasi
3.	Data Paket Wisata	Desa Wisata	Dokumentasi
4.	Data Lapangan Pekerjaan Desa Wisata	Desa Wisata	Dokumentasi
5.	Data Pendapatan Desa Wisata	Desa Wisata	Dokumentasi
6.	Data Pengembangan Desa Wisata	Desa Wisata	Dokumentasi
7.	Data Prestasi Desa Wisata	Desa Wisata	Dokumentasi
8.	Data Insfrastruktur Desa Wisata	Desa Wisata	Dokumentasi

Sumber: Diolah oleh Penulis (2023)

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti merupakan metode dalam mengumpulkan data Penelitian mengenai pengembangan pariwisata aman bencana melalui *community based tourism* menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara digunakan dengan tujuan menghimpun atau mengumpulkan informasi melalui percakapan atau dialog antara dua pihak. Penelitian ini menggunakan wawancara bebas terpimpin dimana pertanyaan-pertanyaan telah disusun secara terstruktur sebagai pedoman berisi garis besar. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan pengembangan pariwisata aman bencana berbasis komunitas lokal melalui *community based tourism*. Setelah mendapatkan data dari wawancara peneliti akan mengumpulkan berupa catatan ataupun rekaman kemudian diolah sebagai hasil untuk keperluan analisis data. Pihak-pihak yang akan diwawancarai terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.8 Data Wawancara

No.	Narasumber	Nama Narasumber
1.	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Karman, A.Md.
2.	BPBD Kabupaten Bantul	Gunawan Prasetya, S.T. dan Fatah Yoga
3.	Lurah Mangunan	Aris Purwanto
4.	Lurah Wukirsari	Susilo Hapsoro, S.E.
5.	Ketua Desa Wisata Kaki Langit	Purwiharsono, S.Pt. dan Sumidjan
6.	Ketua Desa Wisata Wukirsari	Nur Ahmadi
7.	Komunitas/Masyarakat Desa Wisata Kaki Langit	Sochiban, Lusi Wahyuni, Srini, Suparman, Anang Suhendry, Hanifah, Sargito
8.	Komunitas/Masyarakat Desa Wisata Wukirsari	Widi, Martinah, Wartini, Sri

Sumber: Diolah oleh Penulis (2023)

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pendokumentasian data melibatkan pencatatan yang signifikan mengenai permasalahan yang sedang diteliti untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan dapat diandalkan yang tidak bergantung pada hasil pemikiran (Khilmiyah, 2016). Dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu metode pengumpulan informasi melalui berbagai bentuk tertulis, yang kemudian dianalisis dan disesuaikan dengan tujuan dan pokok bahasan penelitian. Catatan resmi, arsip, media cetak, jurnal, biografi, foto dan sumber lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber data.

Tabel 1.9 Data Dokumentasi

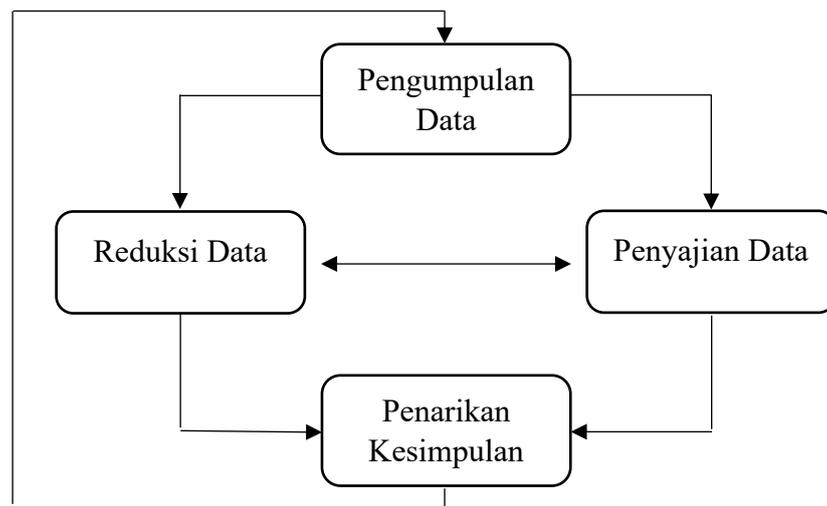
No.	Nama Dokumen
1.	Data Wisata Kabupaten Bantul
2.	Data Kejadian Bencana Kabupaten Bantul
3.	Data Kejadian Bencana Desa Mangunan
4.	Data Kejadian Bencana Desa Wukirsari
5.	Data Paket Wisata Desa Wisata Kaki Langit
6.	Data Paket Wisata Desa Wisata Wukirsari
7.	Data Lapangan Pekerjaan Desa Wisata Kaki Langit
8.	Data Lapangan Pekerjaan Desa Wisata Wukirsari
9.	Data Pendapatan Desa Wisata Kaki Langit
10.	Data Pendapatan Desa Wisata Wukirsari
11.	Data Pengembangan Desa Wisata Kaki Langit
12.	Data Pengembangan Desa Wisata Wukirsari
13.	Data Prestasi Desa Wisata Kaki Langit
14.	Data Prestasi Desa Wisata Wukirsari
15.	Data Infrastruktur Desa Wisata Kaki Langit
16.	Data Infrastruktur Desa Wisata Wukirsari

Sumber: Diolah oleh Penulis (2023)

5) Teknik Analisis Data

Analisa data sebagai upaya guna meningkatkan pengetahuan peneliti untuk mencari dan menata data secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara serta catatan yang ada di lapangan, selanjutnya data akan dikategorikan sesuai dengan topik pembahasan kemudian dijabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih bagian yang dianggap penting dan selanjutnya akan dipelajari, lalu dibuatlah kesimpulan sehingga dapat memberikan pemahaman kepada diri sendiri maupun orang lain. Terkait pengembangan pariwisata aman bencana berbasis komunitas lokal melalui *community based tourism*. Tahapan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 1.5 Teknik Analisis Data



Sumber: Diolah oleh Penulis (2023)

Berdasarkan bagan 1.2 penelitian ini teknik analisis data dapat dijelaskan melalui langkah-langkah berikut:

a. Reduksi Data

Tahapan reduksi data dalam penelitian ini sebagai proses menyederhanakan, mengkategorikan, dan menghilangkan data yang tidak relevan sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang mendalam dan memudahkan pengambilan kesimpulan. Tahap reduksi dalam analisis data diperlukan karena besarnya volume dan kompleksitas data. Tujuan dari langkah pengurangan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata aman bencana berbasis komunitas lokal melalui *community based tourism*.

b. Penyajian Data

Data yang di sajikan merupakan sekumpulan data yang jelas dan metodis sehingga dapat diambil kesimpulan darinya. Pada penelitian ini data dapat disajikan dengan menggunakan matriks, grafik, bagan, jaringan, atau teks naratif dalam bentuk catatan lapangan. Penyajian data ini akan membuat data lebih mudah dipahami dengan mengorganisasikan dan menyusunnya dalam suatu pola yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata aman bencana berbasis komunitas lokal melalui *community based tourism*.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahapan penarikan kesimpulan digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Kesimpulan digunakan untuk menafsirkan seluruh data yang sudah dikumpulkan. Selain itu, kesimpulan dapat

berisi saran mengenai pengembangan pariwisata aman bencana berbasis komunitas lokal melalui *community based tourism*.